



Aktivisme Digital : Gaya Politik Baru Kaum Muda

Zakaria Habib Al-Ra'zie^{1*}, Syaid Mirza Shirazi², Ferdi Prayuda³

^{1,2,3} Universitas Pamulang, Indonesia

Email : zakaria@unpam.ac.id

Alamat: Jl. Lintas Serang - Jakarta Kampung Malandang Kel. Kelodran Kec. Walantaka, Kota Serang - Banten 42183

Korespondensi penulis: zakaria@unpam.ac.id

Abstract. *Young people play a very important role in today's political dynamics. In the context of rapid social change and advances in information technology, young people have found new ways to express their opinions and participate in the political process, one of which is through digital activism. Digital activism refers to political involvement carried out by young people by utilizing digital instruments, especially through social media. This research focuses on youth engagement in digital activism and explores the impact of these new movements on social and political change. The methodology used is a qualitative approach by utilizing secondary data from literature studies, while the applied analytical techniques are descriptive and analytical. The results of the study show that there are various forms of digital activism, including online campaigns, petitions, the use of hashtags, and mobilization of movements through social media. Digital activism also has the potential to influence public policy and public perception. However, this movement is also faced with a number of challenges, such as disinformation, propaganda, and technical obstacles such as uneven internet access in various regions. From this research, it is hoped that new insights can be obtained about the dynamics of youth political participation in the digital era, as well as provide recommendations for social activists and policymakers to support the active involvement of the younger generation in the political process.*

Keywords: *Activism, Digital, Style, Youth, Politics*

Abstrak. Kaum muda memainkan peran yang sangat penting dalam dinamika politik saat ini. Dalam konteks perubahan sosial yang cepat dan kemajuan teknologi informasi, generasi muda telah menemukan cara-cara baru untuk menyampaikan pendapat dan berpartisipasi dalam proses politik, salah satunya melalui aktivisme digital. Aktivisme digital merujuk pada keterlibatan politik yang dilakukan oleh kaum muda dengan memanfaatkan instrumen digital, terutama melalui media sosial. Penelitian ini berfokus pada keterlibatan kaum muda dalam aktivisme digital dan mengeksplorasi dampak dari gerakan baru ini terhadap perubahan sosial dan politik. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan memanfaatkan data sekunder dari studi literatur, sementara teknik analisis yang diterapkan bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat berbagai bentuk aktivisme digital, termasuk kampanye *online*, petisi, penggunaan hashtag, serta mobilisasi gerakan melalui media sosial. Aktivisme digital juga memiliki potensi untuk memengaruhi kebijakan publik dan persepsi masyarakat. Namun, gerakan ini juga dihadapkan pada sejumlah tantangan, seperti disinformasi, propaganda, dan kendala teknis seperti ketidakmerataan akses internet di berbagai daerah. Dari penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh wawasan baru mengenai dinamika partisipasi politik kaum muda di era digital, serta memberikan rekomendasi bagi para penggiat sosial dan pembuat kebijakan untuk mendukung keterlibatan aktif generasi muda dalam proses politik.

Kata kunci: Aktivisme, Digital, Gaya, Muda, Politik

1. LATAR BELAKANG

Aktivisme politik di kalangan kaum muda telah menjadi fenomena yang semakin menonjol dalam beberapa tahun terakhir. Kaum muda, sebagai generasi yang tumbuh dalam era teknologi dan informasi, memiliki akses yang lebih besar terhadap berbagai sumber informasi dan *platform* komunikasi. Aktivisme politik tersebut dilakukan kaum muda baik

Received: Maret 09, 2024; Revised: Maret 24, 2025; Accepted: April 08, 2025; Online Available: Mei 24, 2025

secara langsung maupun melalui media sosial. Aktivisme ini tidak hanya terbatas pada isu-isu lokal, tetapi juga mencakup isu global seperti perubahan iklim, hak asasi manusia, dan keadilan sosial.

Salah satu contoh nyata dari aktivisme kaum muda adalah gerakan "*Fridays for Future*" yang dipimpin oleh aktivis muda Greta Thunberg. Gerakan ini dimulai pada tahun 2018 dan telah menginspirasi jutaan kaum muda di seluruh dunia untuk terlibat dalam aksi protes menuntut tindakan terhadap perubahan iklim. Dalam gerakan "*Fridays For Future*" pada September 2019, lebih dari 6 juta orang berpartisipasi dalam aksi protes global yang menunjukkan betapa kuatnya suara kaum muda dalam isu ini (The Guardian, 2019).

Selain itu, kaum muda juga semakin terlibat dalam politik melalui organisasi-organisasi non-pemerintah (NGO) dan kelompok advokasi. Melalui keterlibatan tersebut kaum muda dapat merasa lebih berdaya untuk mempengaruhi kebijakan publik yang dibuat pemerintah (Douglas, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa aktivisme politik tidak hanya menjadi sarana untuk menyuarakan pendapat, tetapi juga sebagai cara untuk mengubah kebijakan yang berdampak pada kehidupan mereka.

Namun, tantangan yang dihadapi tetap ada. Banyak kaum muda yang merasa bahwa suara mereka tidak didengar dalam proses politik formal. Misalnya, menurut hasil penelitian Bruno Castanho Silva, terjadi penurunan partisipasi pemilu di beberapa negara di seluruh dunia, dengan penyebabnya kaum muda merasa tidak terwakili generasinya oleh pemimpin politik yang ada (Silva, 2024). Hal ini menciptakan rasa frustrasi yang bisa mendorong kaum muda untuk mencari saluran alternatif untuk menyuarakan pendapat, termasuk melalui aktivisme digital.

Dengan semakin berkembangnya teknologi, aktivisme politik kaum muda juga mengalami transformasi. Kini, mereka tidak hanya mengandalkan aksi di lapangan, tetapi juga memanfaatkan *platform* digital untuk menyebarkan pesan dan mengorganisir aksi. Hal ini menciptakan peluang baru bagi kaum muda untuk berpartisipasi dalam politik, meskipun juga membawa tantangan baru dalam hal kredibilitas informasi dan dampak jangka panjang dari aksi tersebut.

Sejarah aktivisme politik di kalangan kaum muda dapat ditelusuri kembali ke berbagai gerakan sosial yang terjadi di seluruh dunia. Salah satu momen penting dalam sejarah ini adalah gerakan protes mahasiswa di tahun 1960-an, seperti gerakan anti-perang Vietnam di Amerika Serikat (Larasatiningrum, 2015). Mahasiswa saat itu menggunakan berbagai bentuk media,

termasuk poster dan pamflet, untuk menyuarakan penolakan mereka terhadap perang. Gerakan ini dinilai berhasil menggerakkan opini publik dan mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Di Indonesia, sejarah aktivisme politik kaum muda juga memiliki akar yang dalam. Gerakan mahasiswa 1998 yang menuntut reformasi dan pengunduran diri Presiden Soeharto adalah salah satu contoh paling signifikan (Supriyanto, 2022). Dalam aksi tersebut, mahasiswa berhasil mengorganisir massa besar-besaran dan menggunakan media cetak serta televisi untuk menyebarkan pesan mereka. Peran mahasiswa dalam gerakan ini sangat krusial, dan keberhasilan mereka membuka jalan bagi demokratisasi di Indonesia.

Dengan kemajuan teknologi, bentuk aktivisme politik kaum muda juga mengalami evolusi. Pada tahun 2000-an, munculnya internet dan media sosial mulai mengubah cara kaum muda berorganisasi dan berkomunikasi. Gerakan "*Arab Spring*" pada tahun 2011 menjadi salah satu contoh bagaimana media sosial dapat digunakan untuk mengorganisir protes massal (Smidi & Shahin, 2017). Pada kasus ini media sosial berperan penting dalam menyebarkan informasi dan mobilisasi massa di negara-negara Arab.

Namun, tidak semua bentuk aktivisme digital berjalan mulus. Banyak pemerintah yang merespons dengan penindasan terhadap aktivis muda yang menggunakan *platform* digital untuk menyuarakan pendapat. Di beberapa negara, pemerintah menerapkan pemblokiran internet dan sensor media sosial untuk membungkam suara-suara kritis (Ashokkumar et al., 2020). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun teknologi memberikan peluang baru, tantangan dan risiko tetap ada bagi kaum muda yang berani bersuara.

Melalui sejarah aktivisme politik di kalangan kaum muda ini terlihat bahwa mereka telah lama menjadi agen perubahan sosial. Dari protes di jalanan hingga penggunaan media digital, kaum muda terus beradaptasi dengan konteks sosial dan politik yang ada. Dengan semakin meningkatnya ketidakpuasan terhadap sistem yang ada, aktivisme kaum muda diprediksi akan terus berkembang dan memainkan peran penting dalam pembentukan masa depan politik.

Aktivisme digital dapat didefinisikan sebagai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, terutama internet dan media sosial, untuk mempromosikan perubahan sosial dan politik (Rachimoellah et al., 2024, p. 1). Aktivisme digital melibatkan berbagai bentuk partisipasi politik, mulai dari kampanye *online*, petisi digital, hingga mobilisasi massa melalui media sosial. Definisi ini mencakup berbagai strategi yang digunakan oleh aktivis untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan menggalang dukungan untuk isu-isu tertentu.

Salah satu karakteristik utama dari aktivisme digital adalah kemampuannya untuk mengorganisir dan memobilisasi dalam waktu singkat. Dengan hanya beberapa klik, aktivis dapat menyebarkan pesan mereka ke ribuan, bahkan jutaan orang di seluruh dunia. Sebagai contoh, gerakan *#BlackLivesMatter* yang muncul setelah kematian George Floyd pada tahun 2020 menunjukkan bagaimana media sosial dapat digunakan untuk menggalang dukungan dan memobilisasi aksi protes di berbagai kota di Amerika Serikat dan seluruh dunia (Tufekci, 2017, pp. 205–206).

Aktivisme digital juga memungkinkan partisipasi masyarakat yang lebih inklusif. Dalam banyak kasus, orang-orang yang sebelumnya tidak memiliki akses ke *platform* politik tradisional dapat terlibat dalam diskusi dan aksi lewat *platform* digital. Hal ini menunjukkan bahwa aktivisme digital dapat menjadi jembatan bagi kaum muda dan kelompok marginal untuk menyuarakan pendapat mereka (Pratiwi, 2021).

Namun, ada juga tantangan yang dihadapi oleh aktivisme digital. Salah satunya adalah masalah penyebaran informasi yang salah atau hoaks. Dalam konteks ini, aktivisme digital sering kali harus berjuang melawan misinformasi yang dapat merusak kredibilitas gerakan. Sebab informasi yang salah memiliki kecenderungan lebih cepat menyebar di media sosial dibandingkan dengan informasi yang benar (Rahmadhany et al., 2021, p. 30). Hal ini menciptakan tantangan bagi aktivis untuk memastikan bahwa pesan mereka tetap akurat dan dapat dipercaya.

Dengan demikian, aktivisme digital merupakan fenomena yang kompleks dan dinamis. Dengan memanfaatkan teknologi, kaum muda dapat mengorganisir dan menyuarakan pendapat mereka dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, tantangan yang dihadapi juga tidak bisa diabaikan, dan penting bagi aktivis untuk tetap kritis terhadap cara mereka menggunakan *platform* digital.

Berdasarkan hal tersebut, permasalahan yang diambil dalam penelitian ini adalah bagaimana peran kaum muda dalam gerakan politik lewat *platform* media sosial, serta dampak aktifitas tersebut terhadap perubahan sosial dan politik. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk aktivisme digital kaum muda dan menganalisis pengaruh gerakan tersebut terhadap partisipasi politik kaum muda.

2. KAJIAN TEORITIS

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini digunakan sejumlah teori sebagai pisau analisa. Menurut teori mobilisasi sumber daya, dijelaskan tentang proses individu dan kelompok yang dapat mengorganisir dan memanfaatkan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan politik mereka. Menurut McCarthy dan Zald, mobilisasi sumber daya mencakup akses terhadap uang, waktu, dan keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam aktivitas politik (McCarthy & Zald, 1977). Dalam konteks aktivisme digital, sumber daya ini sering kali berbentuk *platform online*, akses internet, dan kemampuan untuk menggunakan alat komunikasi digital. Menurut data Statista, hingga Februari 2025 sekitar 5,56 miliar orang di seluruh dunia atau setara 67,9% populasi dunia menggunakan internet, yang memberikan peluang besar bagi kaum muda untuk terlibat dalam aktivisme (Statista, 2025).

Contoh nyata dari praktik teori ini misalnya gerakan "*Fridays for Future*" yang dipelopori oleh aktivis muda Greta Thunberg. Gerakan ini berhasil menggerakkan jutaan orang di seluruh dunia untuk berpartisipasi dalam protes iklim dengan memanfaatkan media sosial sebagai *platform* utama untuk mobilisasi (Sainz & Hanna, 2023). Dengan menggunakan hashtag seperti *#FridaysForFuture*, kaum muda dapat mengorganisir dan mengkoordinasikan aksi secara efektif, menunjukkan bagaimana sumber daya digital dapat dimobilisasi untuk tujuan kolektif.

Selanjutnya, teori jaringan sosial. Teori ini berfokus pada hubungan antar individu dan bagaimana jaringan ini dapat mempengaruhi perilaku kolektif. Dalam konteks aktivisme digital, media sosial berfungsi sebagai jaringan yang memungkinkan pertukaran informasi dan ide secara cepat dan efisien. Menurut teori ini, individu yang terhubung dalam jaringan sosial cenderung lebih aktif dalam partisipasi politik karena mereka mendapatkan dukungan dan informasi dari jaringan mereka (Ida et al., 2025). Hal ini sangat relevan bagi kaum muda, yang sering kali mengandalkan *platform* seperti Twitter, Instagram, dan TikTok untuk menyebarkan pesan politik.

Misalnya, dalam gerakan *Black Lives Matter* (BLM) telah memanfaatkan jaringan sosial untuk memperluas jangkauan mereka dan menggalang dukungan. Data menunjukkan bahwa *hashtag #BlackLivesMatter* telah digunakan lebih dari 44 juta kali di media sosial dalam dekade terakhir, yang menciptakan kesadaran global tentang isu rasial dan ketidakadilan (Pew Research Center, 2023). Jaringan sosial memungkinkan kaum muda untuk terhubung dengan aktivis di seluruh dunia, membangun solidaritas dan kolaborasi yang lebih luas.

Kemudian, teori perubahan sosial. Menurut Henry, perubahan sosial merupakan semua aspek tentang bagaimana gerakan sosial dapat menghasilkan perubahan dalam interaksi, perilaku, norma dan nilai dalam masyarakat (Hilmi, 2020, p. 2). Dalam konteks aktivisme digital, teori ini dapat diterapkan untuk memahami bagaimana *platform online* memfasilitasi diskusi dan advokasi mengenai isu-isu penting di masyarakat. Hal ini terjadi sebab, internet pada saat ini telah menjadi ruang publik baru di mana ide-ide dapat diuji dan disebarluaskan, memungkinkan kaum muda untuk berkontribusi pada perubahan sosial secara langsung.

Salah satu contoh nyata dari perubahan sosial yang dipicu oleh aktivisme digital adalah gerakan *#MeToo*. Dimulai sebagai kampanye di media sosial untuk mengangkat suara korban pelecehan seksual, gerakan ini telah mengubah cara masyarakat memandang isu-isu gender dan kekerasan. Setelah kampanye *#MeToo* ini, banyak korporasi dan institusi mulai menerapkan kebijakan yang lebih ketat terhadap pelecehan seksual (Amin & Nazariana, 2023, p. 1247). Hal ini menunjukkan bahwa aktivisme digital tidak hanya mempengaruhi opini publik tetapi juga mendorong lembaga untuk melakukan perubahan struktural.

Kaum muda saat ini merupakan kelompok demografis yang paling aktif dalam penggunaan teknologi dan media sosial. Di Indonesia, menurut survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada 2024, ditemukan bahwa lebih dari 60% pengguna internet di Indonesia adalah kaum muda yang berasal dari Generasi Z (1997-2012) dan Generasi Milenial (1981-1996) (APJII, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa generasi muda di Indonesia juga aktif dalam menggunakan teknologi untuk berpartisipasi dalam diskusi politik dan sosial. Dengan akses yang semakin mudah, kaum muda memiliki potensi besar untuk mempengaruhi kebijakan publik melalui aktivisme digital.

Kemudian, media sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemikiran dan tindakan politik kaum muda. *Platform* seperti Twitter (X) dan Instagram tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai ruang di mana ide dan nilai dapat dipertukarkan. Sebagaimana perkembangan saat ini di banyak negara, kampanye politik juga semakin bergantung pada media sosial untuk menjangkau pemilih muda.

Selain itu, kampanye yang aktif di media sosial juga dapat meningkatkan partisipasi pemilih di kalangan generasi muda. Misalnya, hasil penelitian terhadap partisipasi politik Generasi Z dalam Pemilu 2024 di Jawa Tengah, menunjukkan bahwa keterlibatan di media sosial dapat meningkatkan kesadaran politik dan mendorong partisipasi dalam kegiatan politik di kalangan kaum muda (Achmad & Dwimawanti, 2024). Ini menunjukkan bahwa media sosial

bukan hanya alat untuk menyebarkan informasi, tetapi juga dapat berfungsi sebagai pendorong partisipasi politik yang signifikan.

3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, pendekatan yang diambil adalah pendekatan kualitatif. Menurut pandangan Moleong, tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk mendalami dan memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Hal ini mencakup berbagai aspek seperti persepsi, tindakan, perilaku, motivasi, serta elemen-elemen lain yang dapat diidentifikasi dan ditangkap secara menyeluruh (Noor, 2020, pp. 104–105). Pendekatan kualitatif ini memungkinkan peneliti untuk menggali lebih dalam tentang pengalaman dan makna yang diberikan oleh subjek, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai konteks dan dinamika yang ada dalam penelitian ini.

Penelitian ini menekankan pentingnya kedalaman data dari fenomena yang dianalisis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai dunia sosial yang sedang diteliti (Tawakkal & Rohman, 2022, p. 6). Oleh karena itu, penelitian kualitatif dipandang sebagai pendekatan yang paling relevan untuk tema penelitian ini yang berkaitan dengan fenomena politik yang dinamis (Al-Ra'zie, 2025, p. 152).

Penelitian ini memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber, termasuk buku, jurnal, dan dokumentasi media *online*. Proses analisis data kualitatif ini melibatkan beberapa tahapan kunci, yaitu: (1) pengumpulan data, (2) pemadatan atau reduksi data yang relevan, (3) penyajian data yang telah dipilih, dan (4) penjelasan mengenai data hasil analisis (Sarosa, 2021, pp. 3–4). Proses analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menginterpretasikan hubungan antara fenomena yang diteliti dan teori yang digunakan sebagai alat analisis. Selanjutnya, kesimpulan dirumuskan sebagai hasil dari analisis tersebut.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk-Bentuk Aktivisme Digital

Terdapat berbagai macam bentuk aktivisme digital yang bisa dilakukan kaum muda. Dengan memanfaatkan sumber daya teknologi dan jaringan digital yang dimiliki, kaum muda bisa membuat gerakan seperti kampanye *online*, petisi, penggunaan *hashtag* dan mobilisasi gerakan *online*.

1. Kampanye *Online* dan Petisi

Kampanye *online* dan petisi merupakan salah satu bentuk aktivisme digital yang paling umum dan efektif dalam menarik perhatian publik terhadap isu-isu sosial, politik dan lingkungan. Melalui *platform* seperti *Change.org* dan *Avaaz*, individu dan organisasi dapat dengan mudah menginisiasi petisi yang mendukung perubahan kebijakan atau menuntut tindakan dari pemerintah dan perusahaan. Menurut laporan dari *Change.org*, pada tahun 2015, lebih dari 100 juta petisi telah dibuat di seluruh dunia yang berasal dari 196 negara (*Change.org*, 2015).

Banyak kampanye dan petisi *online* yang berhasil memengaruhi kebijakan pemerintah, di Indonesia misalnya: (1) gerakan guru honorer yang mendapatkan pengakuan dari Kementerian Pendidikan, (2) upaya menghapus tes keperawanan untuk perempuan yang bergabung dengan TNI, (3) pencarian keadilan bagi korban pelecehan seksual di universitas di Sumatera Barat, (4) penyelamatan dosen Universitas Syiah Kuala, Saiful Mahdi, yang dihukum penjara karena kritik terhadap kampus, (5) perjuangan ibu-ibu agar nama mereka tercantum di ijazah anak-anak, (6) penghapusan tes PCR sebagai syarat penerbangan, (7) desakan kepada KLHK dan kepolisian untuk mengejar pelaku pembunuhan gajah di Sumatera, dan (8) gerakan *Change.org* yang mendorong pembebasan konsumen yang dipenjara karena kritik terhadap kosmetik (Tempo, 2022).

Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa kampanye dan petisi *online* mampu memicu diskusi luas di media sosial dan menarik perhatian media mainstream, sehingga mempengaruhi opini publik dan kebijakan pemerintah. Dalam hal ini, kaum muda yang memiliki sumber daya dan akses lebih tinggi ke ruang digital, memainkan peran sentral dalam berkontribusi terhadap gerakan ini yang akhirnya mampu membawa perubahan sosial pada tingkat tertentu.

Selain itu, kampanye *online* tidak hanya terbatas pada petisi, tetapi juga mencakup penggalangan dana untuk mendukung berbagai inisiatif sosial, seperti kampanye penggalangan dana untuk membantu korban bencana alam di Indonesia dan lainnya melalui *platform* Kitabisa.com. Menurut laporan Kitabisa.com, hingga akhir tahun 2016 dana yang telah terkumpul mencapai Rp. 61 miliar yang digunakan untuk mendanai lebih dari 3000 kampanye (Firdaus & Tutupoho, 2022, p. 6).

Berdasarkan hal tersebut, kampanye *online* dan petisi terbukti memainkan peran krusial dalam aktivisme digital, memberikan *platform* bagi individu untuk menyuarakan pendapat mereka dan mendorong perubahan yang positif. Dengan memanfaatkan jaringan

sosial yang sudah terbangun lewat teknologi dan media sosial, aktivisme digital dapat menjangkau audiens yang lebih luas dan memfasilitasi dialog yang konstruktif mengenai isu-isu penting.

2. Penggunaan *Hashtag* dan Gerakan Viral

Selain kampanye dan petisi *online*, penggunaan *hashtag* telah menjadi salah satu alat yang paling kuat dalam aktivisme digital. Sebab metode ini memungkinkan isu-isu tertentu untuk menjadi viral dan menarik perhatian global, misalnya *hashtag* seperti *#FridayforFuture*, *#BlackLivesMatter*, *#MeToo*, *#SaveTheAmazon*, *#StopFundingHate*. Melalui penggunaan *hashtag* ini, berbagai organisasi dan individu berhasil menggalang dukungan global, mendorong pemangku kebijakan untuk mengambil tindakan dengan lebih bijaksana.

3. Mobilisasi Melalui *Platform* Media Sosial

Mobilisasi melalui *platform* media sosial juga menjadi salah satu metode utama dalam aktivisme digital, yang memungkinkan individu dan kelompok untuk berorganisasi dan berkolaborasi dalam skala besar. *Platform* seperti Facebook, Twitter (X), dan Instagram tidak hanya menyediakan ruang untuk berbagi informasi, tetapi juga untuk menggerakkan aksi nyata di dunia fisik. Sebuah studi oleh Bart Cammaerts menunjukkan bahwa media sosial adalah alat yang paling efektif untuk mobilisasi massa (Cammaerts, 2015).

Salah satu contoh mobilisasi yang sukses adalah gerakan protes yang terjadi di Hong Kong pada tahun 2019-2020. Dengan memanfaatkan media sosial, para aktivis berhasil mengorganisir demonstrasi besar-besaran yang menarik sekitar 2 juta orang berpartisipasi dalam gerakan protes tersebut (BBC News, 2019). Gerakan ini sebagian besar terkoordinasi melalui grup Facebook, Twitter (X) dan pesan langsung di aplikasi seperti Telegram (Xinyue, 2023).

Dampak Aktivisme Digital

Sebagai sebuah gerakan yang baru, aktivisme digital sudah terbukti mampu memberikan dampak nyata terhadap kehidupan sosial masyarakat, mulai dari perubahan kebijakan publik yang dibuat pemerintah, perubahan persepsi di masyarakat, hingga meningkatkan partisipasi politik yang lebih tinggi di kalangan kaum muda.

1. Pengaruh terhadap Kebijakan Publik

Aktivisme digital telah menjadi alat yang sangat berpengaruh dalam memengaruhi kebijakan publik di berbagai negara. Melalui *platform* media sosial, aktivis dapat menyebarkan informasi dan mobilisasi dukungan untuk isu-isu tertentu, yang sering kali menarik perhatian pembuat kebijakan. Sebagai contoh, gerakan *#BlackLivesMatter* yang muncul di Amerika Serikat telah mendorong perubahan kebijakan terkait keadilan sosial dan reformasi kepolisian. Hal ini menunjukkan penggunaan media sosial dalam kampanye terbukti telah meningkatkan kesadaran publik, memperkuat solidaritas dan membangun koalisi, serta memperluas gerakan sosial yang dibangun (Mundt et al., 2018).

Saat ini aktivisme digital berkembang bukan hanya sebagai tren, tetapi juga merupakan bagian integral dari proses demokrasi modern. Ketika suara masyarakat terdengar melalui media sosial, pembuat kebijakan merasa terdorong untuk merespons kebutuhan dan aspirasi publik, yang pada gilirannya dapat menghasilkan perubahan kebijakan yang lebih responsif dan inklusif.

Kemudian, dalam konteks global, aktivisme digital juga telah berperan dalam gerakan pro-demokrasi di negara-negara otoriter. Di Hong Kong, misalnya, aktivis menggunakan media sosial untuk mengorganisir protes dan menyebarkan informasi tentang kondisi politik di Hongkong seperti melalui *Umbrella Movement* (Gerakan Payung). Lewat gerakan ini kaum muda Hongkong membangun solidaritas untuk menuntut pemerintah memberikan partisipasi politik yang lebih luas dan transparan terhadap rakyat (Wong, 2021).

2. Perubahan dalam Persepsi Masyarakat

Aktivisme digital juga mampu mengubah cara masyarakat memandang berbagai isu sosial dan politik. Dengan adanya akses informasi yang lebih mudah melalui internet, masyarakat kini lebih cepat terpapar pada isu-isu yang mungkin sebelumnya tidak mereka ketahui. Sebagai contoh, kampanye *#MeToo* yang mengangkat isu pelecehan seksual telah berhasil mengubah persepsi masyarakat tentang kekerasan berbasis gender. Gerakan ini berhasil mendorong lebih banyak wanita untuk berbicara tentang pengalaman mereka dan meningkatkan kesadaran akan masalah ini di seluruh dunia.

Kemudian, aktivisme digital tidak hanya berperan dalam memfasilitasi penyebaran informasi, tetapi juga membangun kesadaran kolektif di kalangan masyarakat. Sebagai contoh, kampanye untuk perubahan iklim yang dipimpin oleh generasi muda, seperti

gerakan Fridays for Future, telah berhasil menarik perhatian global dan mengubah cara pandang masyarakat terhadap isu lingkungan.

Selain itu, aktivisme digital juga memberikan ruang bagi kelompok-kelompok marginal untuk menyuarakan pendapat mereka. Dalam konteks ini, media sosial menjadi *platform* yang memungkinkan suara-suara yang selama ini terpinggirkan untuk didengar.

Dengan demikian, aktivisme digital tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menyebarkan informasi, tetapi juga sebagai katalisator untuk perubahan sosial yang lebih luas. Meskipun terdapat tantangan terkait dengan polarisasi dan disinformasi, dampak positif dari aktivisme digital dalam mengubah persepsi masyarakat sangat jelas terlihat.

3. Keterlibatan Politik yang Lebih Tinggi di Kalangan Kaum Muda

Keterlibatan politik di kalangan kaum muda telah meningkat secara signifikan berkat aktivisme digital. *Platform* media sosial seperti Twitter (X), Instagram, dan TikTok menjadi sarana bagi generasi muda untuk mengekspresikan pendapat dan berpartisipasi dalam diskusi politik. Selain itu, aktivisme digital juga memungkinkan kaum muda untuk mengorganisir dan berkolaborasi dalam proyek-proyek yang berorientasi pada perubahan sosial. Misalnya, banyak organisasi pemuda yang menggunakan *platform* digital untuk mengorganisir acara, webinar, dan diskusi yang berkaitan dengan isu-isu politik dan sosial. Ini menciptakan komunitas yang lebih terhubung dan mendorong partisipasi aktif dalam proses demokrasi.

Selanjutnya, walaupun aktivisme digital telah mendorong partisipasi generasi muda dalam aspek sosial politik, masih terdapat tugas yang perlu diselesaikan, yaitu memastikan bahwa pendapat generasi muda benar-benar diperhatikan dalam proses pengambilan keputusan oleh para pembuat kebijakan. Meskipun terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi, potensi untuk menghasilkan perubahan yang berarti melalui keterlibatan aktif tetap ada.

Tantangan dan Hambatan Aktivisme Digital

Meskipun terdapat banyak bentuk aktivisme digital dan berbagai macam dampak positif yang bisa diberikan lewat gerakan tersebut, namun tetap ada sejumlah tantangan yang perlu dihadapi.

1. Disinformasi dan Propaganda

Aktivisme digital telah menjadi alat yang penting dalam memperjuangkan kepentingan, keadilan sosial dan hak asasi manusia. Namun, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh para aktivis adalah disinformasi dan propaganda. Disinformasi merujuk pada penyebaran informasi yang salah atau menyesatkan, sedangkan propaganda adalah upaya sistematis untuk mempengaruhi opini publik dengan cara yang bias. Penyebaran informasi yang salah tentang politik menjadi masalah serius dan menyebabkan polarisasi politik di masyarakat (Kubin & Sikorski, 2021). Kondisi ini cenderung terjadi di berbagai tempat dan menjadi persoalan global yang dapat mempengaruhi gerakan sosial di seluruh dunia.

Contoh nyata dari dampak disinformasi dapat dilihat dalam gerakan *Black Lives Matter* (BLM). Selama protes BLM, banyak informasi yang salah disebar di media sosial, termasuk klaim mengenai kekerasan yang dilakukan oleh para demonstran. Sebuah studi oleh Massachusetts Institute of Technology (MIT) menemukan bahwa berita palsu dapat menyebar enam kali lebih cepat daripada berita yang benar di *platform* seperti Twitter (Surjatmodjo et al., 2024). Ini menunjukkan bahwa disinformasi dapat merusak citra gerakan dan mengalihkan perhatian dari isu-isu yang sebenarnya penting.

Selain itu, disinformasi sering kali digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk mendiskreditkan gerakan aktivisme. Misalnya, dalam konteks pemilihan umum, banyak akun media sosial yang menyebarkan informasi palsu tentang kandidat tertentu untuk mempengaruhi suara pemilih. Sebuah penelitian oleh Vosoughi, Roy, dan Aral menemukan bahwa berita palsu mengenai pemilu memiliki dampak signifikan terhadap perilaku pemilih, dan dapat merusak integritas proses demokrasi (Vosoughi et al., 2018). Hal ini menjadi tantangan besar bagi aktivis yang berjuang untuk menciptakan perubahan positif.

2. Sensor dan Pembatasan Akses

Sensor dan pembatasan akses merupakan salah satu hambatan paling signifikan yang dihadapi oleh aktivisme digital di berbagai belahan dunia. Banyak negara menerapkan regulasi yang ketat terhadap konten yang dapat diakses oleh warganya, termasuk informasi yang berkaitan dengan isu-isu sosial dan politik. Menurut laporan Freedom House (2024), sekitar 79% populasi dunia hidup di negara-negara yang menerapkan pembatasan akses internet, yang menghalangi kemampuan individu untuk berbagi dan menerima informasi (Green Network, 2024). Hal ini menciptakan lingkungan yang tidak mendukung bagi aktivis digital yang berjuang untuk menyuarakan pendapat mereka.

Salah satu contoh yang mencolok adalah di Tiongkok, di mana pemerintah menerapkan sistem Great Firewall untuk menyensor informasi yang dianggap tidak sesuai dengan agenda politik mereka (Stevenson, 2007). Aktivis pro-demokrasi sering kali menjadi target utama dari sensor ini. Sensor di Tiongkok tidak hanya membatasi akses ke informasi luar, tetapi juga mengawasi dan membatasi komunikasi di dalam negeri, yang membuat para aktivis semakin kesulitan untuk berkoordinasi dan menyebarkan pesan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa sensor dapat menghambat kemampuan aktivis untuk mengorganisir dan memobilisasi dukungan.

Kemudian, di negara-negara lain, seperti Iran dan Turki, pembatasan akses internet juga digunakan untuk menekan suara-suara kritis. Ketika terjadi protes, pemerintah sering kali memutuskan akses internet atau memblokir *platform* media sosial untuk mencegah penyebaran informasi dan mobilisasi massa. Dalam konteks ini, sensor menjadi alat yang efektif untuk mengekang aktivisme digital.

Selain itu, pembatasan akses juga dapat terjadi di *platform* media sosial yang lebih besar, di mana algoritma dapat membatasi jangkauan konten tertentu. Berdasarkan penelitian ditemukan bahwa algoritma di *platform* seperti Twitter (X) dapat mempengaruhi visibilitas konten yang berkaitan dengan isu-isu sosial, sehingga mengurangi dampak aktivisme digital (Galeazzi et al., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa bukan hanya pemerintah, tetapi juga perusahaan teknologi dapat berperan dalam membatasi akses informasi.

Dengan demikian, untuk mengatasi tantangan ini, penting bagi para aktivis untuk mencari cara alternatif dalam menyebarkan informasi dan membangun jaringan. Penggunaan teknologi enkripsi dan VPN dapat membantu mengatasi sensor, meskipun ini juga memiliki tantangan tersendiri juga. Bagaimanapun dalam upaya menghadapi pembatasan akses ini, kolaborasi antara organisasi internasional, pemerintah, dan sektor swasta diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi aktivisme digital.

3. Ketidaksetaraan Digital

Ketidaksetaraan digital adalah tantangan lain yang signifikan dalam aktivisme digital. Meskipun internet telah menjadi alat yang kuat untuk mobilisasi dan penyebaran informasi, tidak semua orang memiliki akses yang sama terhadap teknologi dan internet. Menurut laporan dari *International Telecommunication Union* (ITU) pada 2024 sekitar 2,6 miliar orang di seluruh dunia masih tidak memiliki akses internet, dengan sebagian besar

berada di negara-negara berkembang (ITU, 2024). Ketidaksetaraan ini menciptakan kesenjangan dalam kemampuan individu untuk terlibat dalam aktivisme digital.

Contoh ketidaksetaraan digital dapat dilihat dalam konteks pendidikan. Di banyak negara, akses ke internet yang stabil dan perangkat teknologi yang memadai menjadi syarat untuk pendidikan yang berkualitas. Misalnya, pada masa pandemi COVID-19, siswa yang tidak memiliki akses internet di rumah mengalami kesulitan dalam mengikuti pelajaran daring yang pada gilirannya mengurangi kemampuan mereka untuk berpartisipasi dalam diskusi sosial dan politik. Hal ini menunjukkan bahwa ketidaksetaraan digital tidak hanya berdampak pada akses informasi, tetapi juga pada partisipasi aktif dalam masyarakat.

Di sisi lain, ketidaksetaraan digital juga dapat memperburuk kondisi sosial dan ekonomi. Aktivis yang berjuang untuk keadilan sosial sering kali berasal dari komunitas yang kurang beruntung, di mana akses ke teknologi yang terbatas. Ketidaksetaraan dalam akses teknologi ini dapat memperburuk kemiskinan dan memperlambat pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang. Hal ini menunjukkan bahwa ketidaksetaraan digital tidak hanya menjadi tantangan bagi aktivisme, tetapi juga berkontribusi pada masalah yang lebih besar dalam masyarakat di seluruh dunia.

Oleh karena itu, untuk mengatasi tantangan ketidaksetaraan digital, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta dan organisasi non-pemerintah. Investasi dalam infrastruktur teknologi dan program pendidikan yang mendukung literasi digital akan sangat penting untuk memastikan bahwa semua individu memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat dalam aktivisme digital. Dengan mengurangi ketidaksetaraan ini, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan mendukung bagi semua aktivis.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Aktivisme digital menawarkan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan aktivisme tradisional. Aktivisme tradisional sering kali melibatkan pertemuan fisik, demonstrasi, dan pengorganisasian komunitas secara langsung, yang bisa memakan waktu dan sumber daya yang besar. Di sisi lain, aktivisme digital memungkinkan individu untuk berpartisipasi dari mana saja dan kapan saja, dengan biaya yang relatif rendah. Dengan kemudahan ini, ketertarikan dan antusiasme kaum muda untuk terlibat dalam partisipasi politik yang lebih berdampak juga akan menjadi semakin tinggi.

Ada banyak bentuk aktivisme digital antara lain kampanye *online* dan petisi, penggunaan *hashtag*, dan mobilisasi gerakan melalui media sosial. Semua bentuk aktivisme tersebut sudah terbukti mampu memberikan dampak positif untuk meningkatkan partisipasi kaum muda dalam gerakan sosial politik di berbagai negara di dunia.

Aktivisme digital juga berhasil memberikan dampak yang lebih konkret dalam hal kebijakan publik. Gerakan ini mampu mendorong pemerintah untuk melakukan penyesuaian kembali atas kebijakan yang dibuat berdasarkan tuntutan masyarakat lewat aktivisme digital. Selain itu, gerakan ini juga mampu mengubah persepsi masyarakat terhadap isu-isu tertentu yang diangkat dalam gerakan dan menjadi viral.

Namun, meskipun aktivisme digital memiliki banyak keuntungan, ada juga tantangan yang harus dihadapi. Misalnya, penyebaran informasi yang salah dan berita palsu yang dapat mengganggu gerakan sosial dan membingungkan publik. Selain itu persoalan ketidakmerataan akses internet juga menjadi persoalan penting yang dihadapi oleh aktivisme digital. Sebab dengan keterbatasan akses internet sama artinya dengan keterbatasan aktivisme digital untuk memperluas jangkauannya.

DAFTAR REFERENSI

- Achmad, F., & Dwimawanti, I. H. (2024). Pengaruh penggunaan media sosial terhadap partisipasi politik Generasi Z dalam Pemilu 2024 di Jawa Tengah. *Journal of Public Policy and Management Review*, 1(1), 975–990. <https://doi.org/10.14710/jppmr.v1i1.49755>
- Al-Ra'zie, Z. H. (2025). Lembaga swadaya masyarakat (LSM) sebagai kekuatan politik. *Ensiklopedia of Journal*, 7(2), 150–158. <https://doi.org/10.33559/eoj.v7i2.2799>
- Amin, K., & Nazariana, N. (2023). Analisis gerakan #Metoo sebagai perlawanan kekerasan dan pelecehan seksual bagi perempuan di China. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 5(1), 1247–1268. <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.2971>
- Ashokkumar, A., Talaifar, S., Fraser, W. T., Landabur, R., Buhrmester, M., Gómez, Á., Paredes, B., & Swann, W. B. Jr. (2020). Censoring political opposition online: Who does it and why. *Journal of Experimental Social Psychology*, 91, 104031. <https://doi.org/10.1016/j.jesp.2020.104031>
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). (2024). *APJII jumlah pengguna internet Indonesia tembus 221 juta orang*. <https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>
- BBC News. (2019). Demo Hong Kong: Potret kemarahan dan rasa putus asa warga selama enam bulan terakhir. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-50708953>

- Cammaerts, B. (2015). Social media and activism. In R. Mansell & P. Hwa (Eds.), *The International Encyclopedia of Digital Communication and Society* (pp. 1027–1034). Wiley-Blackwell.
- Change.org. (2015). *Who are Change.org's 100 million users?* <https://www.change.org/l/us/who-are-the-100-million>
- Douglas, A. (2023). NGO reflections on putting the youth first: Improving youth participation in development practice. *Development in Practice*, 33(6), 700–712. <https://doi.org/10.1080/09614524.2023.2213861>
- Firdaus, R., & Tutupoho, R. R. (2022). Teknologi crowdfunding dalam kegiatan penggalangan dana sosial berbasis internet di Indonesia (Studi pada situs Kitabisa.com). *Jurnal Administrasi Profesional*, 3(1), 66–73. <https://doi.org/10.32722/jap.v3i1.4963>
- Galeazzi, A., Paudel, P., Conti, M., De Cristofaro, E., & Stringhini, G. (2024). Revealing the secret power: How algorithms can influence content visibility on social media. *arXiv Preprint*, arXiv:2410.17390. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2410.17390>
- Green Network. (2024). *Minimnya kemajuan dalam kebebasan berinternet di Indonesia*. <https://greennetwork.id/kabar/minimnya-kemajuan-dalam-kebebasan-berinternet-di-indonesia/>
- Hilmi, M. I. (2020). *Modul teori perubahan sosial*. Universitas Jember. <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/114007>
- Ida, R., Mashud, M., Saud, M., Yousaf, F. N., & Ashfaq, A. (2025). Politics in Indonesia: Democracy, social networks and youth political participation. *Cogent Social Sciences*, 11(1), 2432071. <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2432071>
- International Telecommunication Union (ITU). (2024). *Internet use continues to grow, but universality remains elusive, especially in low-income regions*. <https://www.itu.int/itu-d/reports/statistics/2024/11/10/ff24-internet-use/>
- Kubin, E., & Sikorski, C. (2021). The role of (social) media in political polarization: A systematic review. *Annals of the International Communication Association*, 45(3), 188–206. <https://doi.org/10.1080/23808985.2021.1976070>
- Larasatiningrum, A. Y. (2015). Youth political and cultural movements against the United States invasion in Vietnam in the 1960s. *Rubikon: Journal of Transnational American Studies*, 2(1), 1–12. <https://doi.org/10.22146/rubikon.v2i1.34233>
- McCarthy, J. D., & Zald, M. N. (1977). Resource mobilization and social movements: A partial theory. *American Journal of Sociology*, 82(6), 1212–1241. <https://www.jstor.org/stable/2777934>
- Mundt, M., Ross, K., & Burnett, C. M. (2018). Scaling social movements through social media: The case of Black Lives Matter. *Social Media + Society*, 4(4), 2056305118807911. <https://doi.org/10.1177/2056305118807911>

- Noor, Z. Z. (2020). *Metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif: Petunjuk praktis untuk penyusunan skripsi, tesis, dan disertasi*. Deepublish. <https://books.google.co.id/books?id=v37LEAAAQBAJ>
- Pew Research Center. (2023). *Ten years of #BlackLivesMatter on Twitter*. <https://www.pewresearch.org/internet/2023/06/29/ten-years-of-blacklivesmatter-on-twitter/>
- Pratiwi, A. M. (2021). Mengupayakan keadilan bagi korban kekerasan seksual melalui aktivisme tagar: Kesempatan dan kerentanan di Indonesia. *Jurnal Perempuan*, 26(3), 197–206. <https://doi.org/10.34309/jp.v26i3.617>
- Rachimoellah, M., Lubis, P. H., & Utimadini, N. J. (2024). Digital activism and political change: Challenges of social media's impact on political development. *Journal of Middle East and Islamic Studies*, 11(2), 2. <https://doi.org/10.7454/meis.v11i2.177>
- Rahmadhany, A., Safitri, A. A., & Irwansyah, I. (2021). Fenomena penyebaran hoax dan hate speech pada media sosial. *Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi Bisnis*, 3(1), 30–43. <https://doi.org/10.47233/jteksis.v3i1.182>
- Sainz, G. M., & Hanna, A. (2023). Youth digital activism, social media and human rights education: The Fridays for Future movement. *Human Rights Education Review*, 6(1), 116–136. <https://doi.org/10.7577/hrer.4958>
- Sarosa, S. (2021). *Analisis data penelitian kualitatif*. PT Kanisius. <https://books.google.co.id/books?id=YY9LEAAAQBAJ>
- Silva, B. C. (2024). No votes for old men: Leaders' age and youth turnout in comparative perspective. *European Journal of Political Research*, 64(1), 276–295. <https://doi.org/10.1111/1475-6765.12694>
- Smidi, A., & Shahin, S. (2017). Social media and social mobilisation in the Middle East. *India Quarterly*, 73(2), 196–209. <https://www.jstor.org/stable/48505308>
- Statista. (2025). *Number of internet and social media users worldwide as of February 2025*. <https://www.statista.com/statistics/617136/digital-population-worldwide/>
- Stevenson, C. (2007). Breaching the great firewall: China's internet censorship and the quest for freedom of expression in a connected world. *BC International and Comparative Law Review*, 30, 531.
- Supriyanto, S. (2022). Gerakan mahasiswa dalam upaya kejatuhan pemerintah Soeharto 1998. *Jurnal Impresi Indonesia*, 1(2), 66–74. <https://doi.org/10.58344/jii.v1i2.15>
- Surjatmodjo, D., Unde, A. A., Cangara, H., & Sonni, A. F. (2024). Information pandemic: A critical review of disinformation spread on social media and its implications for state resilience. *Social Sciences*, 13(8), 418. <https://doi.org/10.3390/socsci13080418>
- Tawakkal, G. T. I., & Rohman, A. Z. F. (2022). *Metode penelitian kualitatif: Penerapan pada kajian politik pemerintahan*. Universitas Brawijaya Press. <https://books.google.co.id/books?id=AH2REAAAQBAJ>

- Tempo. (2022). 10 keberhasilan petisi online bisa mengubah kebijakan. <https://www.tempo.co/politik/10-keberhasilan-petisi-online-bisa-mengubah-kebijakan-433819>
- The Guardian. (2019). *Climate crisis: 6 million people join latest wave of global protests*. <https://www.theguardian.com/environment/2019/sep/27/climate-crisis-6-million-people-join-latest-wave-of-worldwide-protests>
- Tufekci, Z. (2017). *Twitter and tear gas: The power and fragility of networked protest*. Yale University Press. <http://dx.doi.org/10.25969/mediarep/14848>
- Vosoughi, S., Roy, D., & Aral, S. (2018). The spread of true and false news online. *Science*, 359(6830), 1146–1151. <https://doi.org/10.1126/science.aap9559>
- Wong, W. (2021). Youth participation and social media: Evidence from the youth activism and social movement of Hong Kong. In *Research Handbook on E-Government* (pp. 129–147). Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781786437259.00015>
- Xinyue, D. (2023). Social media as a tool for political mobilization: A case study of the 2020 Hong Kong protests. *Journal of Public Representative and Society Provision*, 3(1), 10–20. <https://doi.org/10.55885/jprsp.v3i1.199>